

## **JURNAL**

# **IMPLIKASI YURIDIS DARI PERUBAHAN PASAL 335 KUHP AYAT (1) BUTIR KE-1 TENTANG PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 1/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAPUSAN FRASE PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN**

## **ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Dimas Indra Swadana**

**NIM.0910110145**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**IMPLIKASI YURIDIS DARI PERUBAHAN PASAL 335 KUHP AYAT (1)  
BUTIR KE-1 TENTANG PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN  
NOMOR: 1/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAPUSAN FRASE  
PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN**

**Dimas Indra Swadana, Paham Triyoso, Milda Istiqomah  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : dimasindraswadana@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frase kata “perbuatan tidak menyenangkan” dengan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar pertimbangan dan implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) Butir ke-1 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi merubah pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” tidak dapat diukur secara objektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh MK yang pertama adalah penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak. Yang kedua adalah unsur dalam pasal 335 KUHP yang telah diubah MK merupakan satu kesatuan (kumulatif).

**Kata Kunci** : *Perbuatan tidak menyenangkan, Perubahan Pasal 335*

**IMPLICATION JURIDICAL OF CHANGES IN THE CRIMINAL CODE  
ARTICLE 335 PARAGRAPH (1) POINT 1 OF UNPLEASANT ACTS BY  
THE CONSTITUTIONAL COURT BASED DECISION NO: 1/PUU-XI/2013  
ON THE ELIMINATION OF PHRASE DEEDS NOT EXCITING**

**Dimas Indra Swadana, Paham Triyoso, Milda Istiqomah**

**ABSTRACT**

The Constitutional Court (MK) remove the phrase "unpleasant acts" by Decision No. 1/PUU-XI/2013. The purpose of this study is to investigate, understand, and analyze the basic considerations and juridical implications of changes in the Criminal Code article 335 paragraph (1) point 1 based on a decision by the Constitutional Court number: 1/PUU-XI/2013 on the Elimination of Phrase Deeds Not Fun. Type of research is normative. The method used in this study there are two kinds of approaches to law (statue approach), the comparative approach (Comparative approach). Types of legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. The basic consideration of the Constitutional Court to change Article 335 of the Criminal Code paragraph (1) point 1 based on the decision of the Constitutional Court number: 1/PUU-XI/2013 is due to the formulation of the offense "*Something other acts and unpleasant treatment*" can not be measured objectively and uncertainty law and injustice so that it is contrary to the principles of the constitution which guarantees the protection of the right to obtain legal certainty. Juridical implications of changes in the Criminal Code article 335 paragraph (1) point 1 by the Court that the first offense is an emphasis on the element of violence or threats of violence that exist in the new article 335 of the Penal Code which is absolute. The second is an element in Article 335 of the Criminal Code has been amended MK is an integral (cumulative).

**Keywords** : *Unpleasant acts, Amendment of Article 335*

## A. PENDAHULUAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan. Hal ini dilatar belakangi karena di dalam pasal 335 KUHP ada unsur “perbuatan tidak menyenangkan” (*onaangenname*) disana. Unsur perbuatan tidak menyenangkan inilah yang membuat pasal ini lebih fleksibel sehingga bisa digunakan untuk menjerat semua tindak pidana. Dalam praktik karena adanya kata-kata “tidak menyenangkan” (*onaangenname*), maka pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oei Alimin Sukanto Wijaya yang merasa dirugikan dengan berlakunya kedua pasal itu mengajukan uji materi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frase kata “perbuatan tidak menyenangkan” dengan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013. Adanya perubahan frase kata dalam suatu pasal pastilah memiliki implikasi atau dampak yuridis terkait unsur tindak pidana di dalamnya yang penting untuk diteliti.

Pasal 335 KUHP atau yang sering disebut pasal keret secara lengkap berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
  - ke-1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
  - ke-2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dalam praktik, karena adanya kata-kata “tidak menyenangkan” (*onaangenname*) tanpa memperhatikan kata sambungannya memperlakukan (*bejegening*), maka karena delik ini pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

disebut KUHP), walaupun ancaman pidananya hanya maksimum satu tahun penjara, dijadikan “keranjang sampah”, sehingga semua perbuatan yang tidak menyenangkan seperti penghinaan, penyerobotan tanah, dipanggil oleh polisi tidak mau hadir dan lain-lain diterapkan pasal ini dan tersangkanya ditahan (sebenarnya penahanan demikian tidak sah).<sup>1</sup>

Delik perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, pernah menimpa Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada Agustus 2013. Ketika itu, Denny diadukan oleh advokat OC Kaligis karena kicauan di Twitter. Ketika itu dia menulis di Twitter tentang advokat yang “maju tak gentar membela yang bayar”.<sup>2</sup> Di kalangan artis, pasal 335 juga sering digunakan. Seperti halnya kasus yang terjadi antara Olga Syahputra juga yang dilaporkan oleh dokter febby karina karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.<sup>3</sup>

Namun semua berubah ketika seseorang berstatus tersangka mempersoalkan aturan pidana (delik) perbuatan tidak menyenangkan dengan cara mengajukan uji materi Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Atas dasar pengajuan uji materi tersebutlah, maka akhirnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menghapus frasa kata “perbuatan tidak menyenangkan” dengan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013. Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP setelah diubah Mahkamah konstitusi selengkapnya berbunyi, “*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 36.

<sup>2</sup> Sabrina Asril, 2012, **Sindir di Twitter, Denny Indrayana Dilaporkan OC Kaligis ke Polisi (online)**, <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/0118321/Sindir.di.Twitter.Denny.Indrayana.Dilaporkan.OC.Kaligis.ke.Polisi>, (10 Juli 2014)

<sup>3</sup> Aris danu, 2013, **Jadi Tersangka, Ini Ancaman Hukuman Olga Syahputra (online)**, [http://artis.inilah.com/read/detail/2033165/jadi-tersangka-ini-ancaman-hukuman-olga-syahputra#.U-pCAeN\\_v-U](http://artis.inilah.com/read/detail/2033165/jadi-tersangka-ini-ancaman-hukuman-olga-syahputra#.U-pCAeN_v-U), (10 Juli 2014)

1. Apa dasar pertimbangan perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan?
2. Apa implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan?

### **C. METODE PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar pertimbangan perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) Butir ke-1 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan. Yang kedua adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 335 KUHP ayat (1) Butir ke-1 oleh Mahkamah Konstitusi setelah Berlakunya Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi pahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum ini diperoleh dari penelusuran literatur. Teknik analisa bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan interpretasi sistematis.

### **D. PEMBAHASAN**

Pemohon disini adalah Oei Alimin Sukanto Wijaya dengan pokok perkara Pengujian Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Permohonannya,

Pemohon menyebutkan dalam permohonannya sebagai individu atau perseorangan yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Surabaya dengan Nomor S-Pgl/3567/X/2012/RESKRIM dikarenakan dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hanya karena telah melontarkan kata-kata *“hei jika kamu berani jangan mukuli aku disini, kalo berani ayo bertengkar di Suramadu”*, berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Pemohon disini beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frase, *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa pada Pasal 335 ayat (1)

Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa dalam pengujian undang-undang yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.<sup>4</sup> Kerugian konstitusional itu merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang (*legal standing*). Hal ini terkait asas kepribadian yang menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 berbicara tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan salah satu wewenangnyanya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>4</sup> Ahmad Fadlil, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik**, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011, hlm 862.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 36.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP, dalam hal Pendapat Mahkamah point [3.15] dan [3.16] menyatakan bahwa,

[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain;

[3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;

Jadi dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik, kualifikasi, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*", dapat menjadi celah dan peluang bagi penyidik serta penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.



Andi Hamzah menyatakan bahwa beliau mengharapkan untuk kedepannya, frasa dalam kalimat “*ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan*” dalam Pasal 335 KUHP dapat dihapus, hal ini dikarenakan jika ditelusuri ke belakang, di dalam KUHP Belanda sendiri tidak ditemukan frasa-frasa tersebut.<sup>6</sup> Hal ini menjadi menarik karena jika ketentuan itu masih tetap menggunakan frasa tersebut, maka hal ini dikhawatirkan dapat menjerat siapapun dan juga dapat disalahgunakan. Mengingat tidak ada batasan yang jelas terkait “*perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan*” ini. Frase ini menimbulkan banyak celah bagi subyektifitas para penegak hukum seperti yang di alami Oei Alimin Sukamto Wijaya.

Frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya diwujudkan lewat produk aturan hukum yang baik karena hukum identik dengan kepastian.<sup>7</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian matriil Pasal 335 ayat (1) Butir 1 KUHP sepanjang frasa, “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” beralasan menurut hukum.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar MK untuk mengabulkan permohonan Oei Alimin Sukamto Wijaya sebagai pemohon dengan Menyatakan frasa, “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

---

<sup>6</sup> Equalaws Consultant, 2014, **Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP Sudah Tidak Menjadi “Pasal Karet”** (*Online*), <http://hukum.kompasiana.com/2014/01/16/pasal-335-ayat-1-butir-1-kuhp-sudah-tidak-menjadi-pasal-karet-625020.html> (19 Juli 2014)

<sup>7</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82.

Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, MK juga menyatakan frasa, *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini seperti pendapat Prof. J.E. Sahetapy, SH., MA., yang dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Beliau menyatakan bahwa,

*“Pasal V UU Nomor 1 Tahun 1946 merupakan batu penguji tentang relevansi dan raison d’etre pasal-pasal KUHPidana dimaksud menyatakan “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”;*”

MK juga menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958)

diubah menjadi, *“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*.

Perbuatan tidak menyenangkan (*onaangename*) yang diatur dalam pasal 335 KUHP yang lama sering disebut sebagai pasal karet. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dari pasal ini dapat digunakan untuk menjerat hampir semua perbuatan yang dirasa menyinggung perasaan orang atau dirasa tidak menyenangkan secara subjektif (*personal*). Menurut Adnan Buyung Nasution, pasal 335 KUHP ini adalah pilihan terakhir bagi pihak yang ingin memidanakan orang lain karena merasa difitnah atau dihina. Hal ini dikarenakan pelapor tidak mampu menunjukkan pasal-pasal yang lebih kongkret dan kuat untuk mendukung tuduhannya.<sup>8</sup>

Dalam penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA), penekanan ada pada penafsiran “unsur paksaan” sebagai unsur utama dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. Penekanan pada unsur “memaksa” sebenarnya adalah logis, karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 ini bila dikaji sesungguhnya termasuk dalam Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIII KUHP, dimana bila melihat tindak pidana atau suatu kejahatan yang diatur didalamnya menentukan bahwa seorang korban kejahatan tidak dapat berbuat-apa, tidak berdaya dan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana kehendaknya sendiri.

Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu sebagai salah satu unsur pasal 335 KUHP menurut pendapat Lamintang menyatakan :

“Paksaan dengan ancaman akan melakukan sesuatu tindakan itu dapat pula ditujukan terhadap orang lain dari pada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Untuk sesuatu percobaan melakukan kejahatan ini adalah cukup,

---

<sup>8</sup> Irwan Nugroho, 2010, **Buyung: Sejak Dulu, Ahli Hukum Sebut Pasal 335 Pasal Sampah (Online)**, <http://news.detik.com/read/2010/07/08/024639/1395161/10/buyung-sejak-dulu-ahli-hukum-sebut-pasal-335-pasal-sampah>, (19 Juli2014)

apabila orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu itu mengetahui tentang adanya ancaman semacam itu.”<sup>9</sup>

Dalam rumusan pasal 335 KUHP tidak menyebutkan adanya unsur “sengaja”. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemaksaan ini tidak harus ada unsur sengaja atau adanya niat dari pelaku. Pelaku juga tidak harus mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Seperti pendapat yang dikemukakan Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa :

“Kini tampak tidak disebutkan unsur kesengajaan, terutama yang meliputi unsur melanggar hukum. Maka, tidaklah perlu dalam tindak pidana memaksa ini, si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar. Jadi, meskipun si pelaku mengira bahwa ia tidak melanggar hukum, tetapi ternyata ia melanggar hukum. Maka ia tentu dikenai hukuman, kecuali apabila dapat dikatakan bahwa padanya sama sekali tidak ada unsur kesalahan sedikitpun.”<sup>10</sup>

Pendapat dari Wirjono Projodikoro ini juga sama dengan pendapat M. Sudrajat Bassar yang menyatakan bahwa :

“Dalam pasal ini tidak ada disebutkan unsur kesengajaan terutama yang meliputi unsur melawan hukum. Jadi, dalam pidana memaksa ini tidaklah perlu si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian, walaupun si pelaku mengira bahwa ia tidak melanggar hukum, akan tetapi ia melanggar hukum, dan toh ia dikenakan hukuman, terkecuali apabila dapat dikatakan bahwa padanya sama sekali tidak ada unsur kesalahan sedikitpun.”<sup>11</sup>

Dalam pasal 335 KUHP, selain kekerasan dapat juga dengan perbuatan lain. Perbuatan lain yang dimaksud dapat berupa ucapan atau kata-kata yang tidak menyenangkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Sudrajat Bassar yaitu :

“Selain kekerasan, disebut juga perbuatan lain (*eenige andere feitelijkheid*). Dengan ini dimaksudkan perbuatan yang bukan kekerasan akan tetapi yang hanya berupa ucapan kata-kata ancaman. Umpamanya seorang ketua organisasi buruh minta kenaikan gaji kepada majikannya dengan ancaman bahwa para buruh akan mogok bekerja apabila permintaannya tidak terpenuhi. Pemogokan inilah yang merupakan perbuatan lain. Istilah yang lebih luas lagi adalah perlakuan yang tidak menyenangkan. Tindak ada penerangan dari para

---

<sup>9</sup> Lamintang, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm 200.

<sup>10</sup> Projodikoro W, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 88.

<sup>11</sup> Bassar M S, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Remadja Kaya, Bandung, 1984, hlm 118.

penulis belanda mengenai tambahan ini, dan tidak ada pada pasal yang bersangkutan di dalam KUHP Belanda”<sup>12</sup>

Dalam pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, dan bukan merupakan suatu akibat dari perbuatan tersangka atau terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan.<sup>13</sup> Perubahan dalam pasal 335 KUHP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945 khususnya pasal 28 D sehingga penyidik dan penuntut umum sebagai garda depan penegak hukum bisa lebih objektif dalam menerapkan pasal 335 KUHP tersebut.

Menurut Wakapolri Komjen Oegroseno, dengan menghilangkan frasa “*perbuatan tidak menyenangkan*” yang terdapat pada Pasal 335 KUHP, bukan berarti perbuatan tidak menyenangkan dihilangkan. Tetapi berubah menjadi perbuatan lain yang menjadikan tidak menyenangkan. Artinya, jika ada perkara yang berkaitan dengan frasa yang mengambang atau tidak jelas, harus dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, harus ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Kalau tidak ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, maka delik tidak bisa diteruskan. Sebaliknya, jika ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka delik dapat diteruskan.<sup>14</sup>

Penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak sebagai implikasi yuridis dari putusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP. Hal ini sangat berbeda dengan rumusan pasal 335 KUHP yang lama dimana penekanan hanya ada pada unsur “paksaan” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Unsur dalam pasal 335 KUHP yang telah diubah MK merupakan satu kesatuan. Unsur dalam pasal tersebut berlaku secara kumulatif yang berarti merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semua. Berbeda dengan pasal 335 KUHP sebelum diubah MK, dimana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 119.

<sup>13</sup> JPR, FITLAW, 2009, **Penerapan Pasal 335 KUHP (online)**, <http://kejaribanyumas.blogspot.com/>, (20 Juli 2014)

<sup>14</sup> Moch Harun Syah, 2014, **Pasal 335 KUHP Dihilangkan MK, Ini Jawaban Kejagung dan Polri (Online)**, <http://news.liputan6.com/read/809320/pasal-335-kuhp-dihilangkan-mk-ini-jawaban-kejagung-dan-polri>, (19 Juli 2014)

unsur di dalam pasal tersebut bersifat alternatif yangmana hanya harus memenuhi unsur “memaksa” disana.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijabarkan, maka kesimpulannya Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi merubah pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PUU-XI/2013, yang pertama adalah karena rumusan delik “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” tidak dapat diukur secara objektif. Dan yang kedua, frase tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh MK yang pertama adalah penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak. Hal ini sangat berbeda dengan rumusan pasal 335 KUHP yang lama dimana penekanan hanya ada pada unsur “paksaan” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. dan yang kedua adalah unsur dalam pasal 335 KUHP yang telah diubah MK merupakan satu kesatuan (kumulatif).

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan salah satu wewenangnya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sudah selayaknya MK menguji lebih banyak lagi undang-undang yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa yang tercermin dalam UUD 1945. KUHP misalnya yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tentu kepribadiannya tidak sama dengan Indonesia. Sudah tentu pula, pemerintah kolonial Belanda menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya untuk diganti dan/atau diperbarui sesuai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.

Dalam penerapan pasal 335 KUHP yang baru ini diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa para penegak hukum dituntut objektif dalam menerapkan pasal ini. Sudah saatnya para

penegak hukum bersikap bijak dan tidak subjektif dalam menindak lanjuti suatu laporan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82.

Ahmad Fadlil, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik**, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011, hlm 862.

Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 36.

Bassar M S, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Remadja Kaya, Bandung, 1984, hlm 118.

Lamintang, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm 200.

Projudikoro W, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 88.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 36.

### ONLINE

Aris danu, 2013, **Jadi Tersangka, Ini Ancaman Hukuman Olga Syahputra (*online*)**, [http:// artis. inilah. com/ read/ detail/ 2033165/ jadi- tersangka- ini- ancaman- hukuman- olga- syahputra#.U-pCAeN\\_v-U](http://artis.inilah.com/read/detail/2033165/jadi-tersangka-ini-ancaman-hukuman-olga-syahputra#.U-pCAeN_v-U), (10 Juli 2014)

Equalaws Consultant, 2014, **Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP Sudah Tidak Menjadi “Pasal Karet” (*Online*)**, [http: // hukum. kompasiana. com/ 2014/ 01/ 16/ pasal- 335- ayat- 1- butir- 1- kuhp- sudah- tidak- menjadi- pasal- karet- 625020. html](http://hukum.kompasiana.com/2014/01/16/pasal-335-ayat-1-butir-1-kuhp-sudah-tidak-menjadi-pasal-karet-625020.html) (19 Juli 2014)

Irwan Nugroho, 2010, **Buyung: Sejak Dulu, Ahli Hukum Sebut Pasal 335 Pasal Sampah (*Online*)**, [http: // news. detik. com/ read/ 2010/ 07/ 08/ 024639/ 1395161/ 10/ buyung- sejak- dulu- ahli- hukum- sebut- pasal- 335- pasal- sampah](http://news.detik.com/read/2010/07/08/024639/1395161/10/buyung-sejak-dulu-ahli-hukum-sebut-pasal-335-pasal-sampah), (19 Juli2014)

JPR, FITLAW, 2009, **Penerapan Pasal 335 KUHP (*online*)**, [http: // kejaribanyumas. blogspot. com/](http://kejaribanyumas.blogspot.com/), (20 Juli 2014)

Moch Harun Syah, 2014, **Pasal 335 KUHP Dihilangkan MK, Ini Jawaban Kejagung dan Polri (*Online*)**, <http://news.liputan6.com/read/809320/pasal-335-kuhp-dihilangkan-mk-ini-jawaban-kejakung-dan-polri>, (19 Juli 2014)

Sabrina Asril, 2012, **Sindir di Twitter, Denny Indrayana Dilaporkan OC Kaligis ke Polisi (*online*)**, <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/0118321/Sindir.di.Twitter.Denny.Indrayana.Dilaporkan.OC.Kaligis.ke.Polisi>, (10 Juli 2014)